

ABSTRAK

Tasya Nabila Al Zahra Putri. 2025. *Kolaborasi Stakeholders Dalam Pengelolaan Wana Wisata Gunung Budheg Kabupaten Tulungagung*. Skripsi. Pembimbing I: Prof. Dr.Dra.Hj. Dwi Ima H.,M.Hum, Pembimbing II: Dr. Anang Sugeng C. S.AP.SH.,M.Si

Pentingnya tata kelola wisata tidak hanya berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan Wana Wisata Gunung Budheg Kabupaten Tulungagung menghadapi berbagai problematika antar aktor. Penelitian ini membahas mengenai kolaborasi antara berbagai *stakeholders* dalam pengelolaan Wana Wisata Gunung Budheg Kabupaten Tulungagung. Permasalahan utama yang diangkat adalah belum optimalnya pengelolaan wisata akibat keterlibatan *stakeholders* yang belum merata, minimnya koordinasi antar aktor, serta keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kolaborasi antar aktor serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kolaborasi dalam pengelolaan wana wisata tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara tematik dengan menekankan pada dimensi vertikal dan horizontal dalam teori *collaborative governance*.

Hasil penelitian di analisis menggunakan teori *collaborative governance* menurut Edward P. Weber, Nicholas P. Lovrich, dan Michael Gaffney dengan indikator vertikal dan horizontal yang menunjukkan bahwa pada dimensi vertikal kolaborasi telah terbentuk secara struktural melalui perjanjian kerja sama (PKS) antara Perhutani, Pemerintah Daerah, dan BUMDes, Kesepakatan ini memperjelas pembagian peran, wewenang, dan tanggung jawab antar aktor dari level atas ke bawah. Pada dimensi horizontal belum terbentuk kolaborasi yang kuat antar aktor lokal. BUMDes dan Pokdarwis, cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas. Faktor pendukung kolaborasi antara lain adanya dasar hukum yang jelas, evaluasi rutin oleh Perhutani setiap triwulan, serta potensi Gunung Budheg sebagai bagian dari Geopark. Namun, kolaborasi belum berjalan optimal karena kurangnya alokasi anggaran rutin dari APBD, lemahnya komunikasi antar aktor, dan ketergantungan operasional pada individu tertentu. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan forum komunikasi antar *stakeholders* dan penguatan tata kelola pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan pariwisata berbasis kolaboratif.

Kata kunci: Kolaborasi, Stakeholders, Tata Kelola, Wana Wisata

ABSTRACTION

Tasya Nabila Al Zahra Putri. 2025. Collaboration Stakeholders In the Management of Mount Budheg Tourism Forest, Tulungagung Regency. Thesis. Supervisor I: Prof. Dr.Dra.Hj. Dwi Ima H.,M.Hum, Supervisor II: Dr. Anang Sugeng C. S.AP.SH.,M.Si

The importance of tourism governance not only contributes to increasing Regional Original Income (PAD) but also has a direct impact on community welfare. The management of the Gunung Budheg Tourism Forest in Tulungagung Regency faces various challenges between actors. This research examines the collaboration between various stakeholders. Stakeholders in the management of the Gunung Budheg Forest Tourism Park in Tulungagung Regency. The main problem raised was the suboptimal management of tourism due to the involvement of stakeholders Uneven distribution of resources, minimal coordination between actors, and limited budgets from local governments. This study aims to analyze the forms of collaboration between actors and identify factors that support and hinder collaboration in managing tourism areas. The research methodology used is descriptive qualitative, with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted thematically, emphasizing the vertical and horizontal dimensions of the theory collaborative governance.

The research results were analyzed using theory collaborative governance According to Edward P. Weber, Nicholas P. Lovrich, and Michael Gaffney, vertical and horizontal indicators indicate that in the vertical dimension, collaboration has been structurally established through a cooperation agreement (PKS) between Perhutani, the Regional Government, and BUMDes. This agreement clarifies the division of roles, authority, and responsibilities between actors from top to bottom. In the horizontal dimension, strong collaboration between local actors has not yet been established. BUMDes and Pokdarwis tend to operate independently without clear coordination. Supporting factors for collaboration include a clear legal basis, routine quarterly evaluations by Perhutani, and the potential of Mount Budheg as part of a Geopark. However, collaboration has not been optimal due to the lack of routine budget allocation from the APBD, weak communication between actors, and operational dependence on certain individuals. This study recommends the establishment of a communication forum between stakeholders and strengthening local government governance in supporting collaborative based tourism development.

Keywords: Collaboration, Stakeholders, Governance, Ecotourism